

Daftar Pustaka

I. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, 2015.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, 2010.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1987.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar (Cetakan Pertama)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.



Bayu Seto Hardjowahono, dkk. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2013.

Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis : Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, Prodeleader, Jakarta, 2014.

Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia Jilid 2*, CV.Armico , Bandung, 1983.

Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia* , PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.

Hari Suharto, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*, Kejaksaan RI, Jakarta, 1985.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St.Paul-Minnessota,1990.

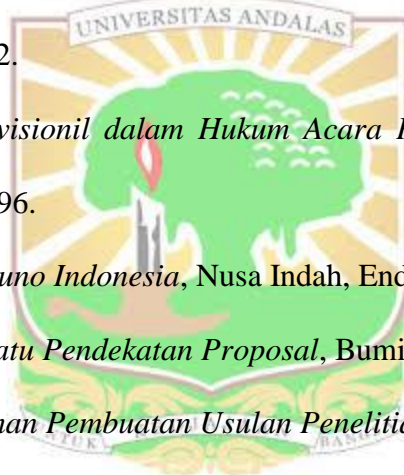
Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (Seri Hukum Harta Kekayaan)*, Prenada Media, Jakarta, 2004.



- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing (ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1971.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- _____, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- L.Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Nusa Indah, Ende Flores, 1978.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan Kedua Puluh Dua)*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Moh.Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mr.R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- _____, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.



M.Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

M.Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.



Ny.Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

P.L.Werry, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990.

PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 1989.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

_____, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

R.M. Surachman dan Jan S.Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

R.M.Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985.

R.Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

R.Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

_____, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

_____, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 7 tentang Penyitaan, Eksekusi, dan lain-lain*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (cetakan ketiga puluh empat)*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Eksam dan Huma, Jakarta, 2006.

Soetoyo Prawirohamdjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

_____, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

_____, *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, 1994.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung, PT.Alumni, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

V.Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.

Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Y.Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah (Ringkasan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2005.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



II. Jurnal

Andi Wika Putri, *Legal Protection of Indigenous Communities on Cultivation Rights Title in Bulukumba Regency*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 7 No.1, Februari 2020, Jerman.

Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum Puslitbangkum Unpad, Nomor Perdana, Januari, 1999, Bandung.

Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” Jurnal Fiat Justitia Volume 1 Nomor 1, Maret 2013, Mappi FHUI, Jakarta.

III. Peraturan Perundang-Undangan

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

“Undang-Undang Darurat (UU Drt.) Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1951 Nomor 9 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 81.

“Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1955 Nomor 27 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 801.

“Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1961 Nomor 254 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 2298.

“Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1961 Nomor 255 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 2299.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1971 Nomor 19 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 2958.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1974 Nomor 1 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 3019.

“Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1976 Nomor 37 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 3086.



“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,”
Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan *Tambahan Lembaran Negara RI*
Nomor 3258.

“Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Lembaran*
Negara RI Tahun 1991 Nomor 59 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 3451.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1997
Nomor 67 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 3698.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lembaran Negara RI*
Tahun 1999 Nomor 42 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 3821.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001,” *Lembaran Negara RI* Tahun 1999 Nomor 140 dan *Tambahan Lembaran Negara*
RI Nomor 387.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,”
Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168 dan *Tambahan Lembaran Negara RI*
Nomor 3889.

“Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Lembaran*
Negara RI Tahun 2000 Nomor 208 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 4026.

“Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”
Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137 dan *Tambahan Lembaran Negara RI*
Nomor 4250.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan,” *Lembaran*
Negara RI Tahun 2004 Nomor 67 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 4401.

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2014 Nomor 3 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5491.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2004 Nomor 131 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 4443.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2007 Nomor 106 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 4756.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2008 Nomor 94 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 4867.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2009 Nomor 143 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5062.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5076.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2010 Nomor 122 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5164.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2011 Nomor 111 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5253.



“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”
Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115 dan *Tambahan Lembaran Negara RI*
Nomor 5255.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” *Lembaran Negara RI* Tahun 2014
Nomor 45 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5512.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lembaran*
Negara RI Tahun 2014 Nomor 266 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5599.

“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Lembaran Negara RI* Tahun
2014 Nomor 337 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5618

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan,” *Lembaran*
Negara RI Tahun 2016 Nomor 9 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5835.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI
Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.



Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

IV. Website

Website Kemenkumham <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html> (terakhir kali dikunjungi pada 20 September 2019 jam 12.00 Wib)

Website BPHN ; <https://bphn.go.id/news/2018110603020089/Masuk-Prolegnas-Prioritas-2019-BPHN-Kebut-Penyusunan-Naskah-Akademik-RUU-Hukum-Acara-Perdata> (terakhir kali dikunjungi pada 20 September 2019 jam 13.00 Wib)

Website DPR ; <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/69> (terakhir kali dikunjungi pada 16 Oktober 2019 jam 09.00 Wib)

